

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba menjawab dengan menggunakan Teori Sistem Dunia dan Teori Kepentingan Nasional.

1. Teori Sistem Dunia⁶

Pengertian dari sistem ini sendiri adalah jika ada perubahan pada satu sistem atau pada bagian dari sistem itu, maka bagian lainpun akan mengikuti atau berpengaruh artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian subsistem-subsistem yang mampu merubah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Munculnya Teori Sistem Dunia sebenarnya merupakan reaksi Teori Ketergantungan, yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan.

Teori Sistem Dunia menurut James E. Daugherty, adalah: "*System theory or general system theory, as series of statement about changes in one or more variables are accompanied, or followed, by changes in other variable or combination of variable*".

Yang dapat diartikan secara sederhana pengertiannya adalah serangkaian unit kerja yang saling berhubungan bila ada perubahan salah satu bagian maka akan diikuti oleh bagian lainnya, yang berarti pula akan mempengaruhi kerja dalam keseluruhan sistem. Untuk dapat mengembangkan suatu gambaran tentang bagaimana suatu sistem (yang berubah) dapat mempengaruhi (perubahan) pada bagian-bagiannya, maka diperlukan pengetahuan tentang ciri-ciri dari konsep

⁶ James E. Daugherty dan P. J. Balthasar, Jr. "Contending Theories Of International Relations" Third

sistem tersebut. Seperti yang yang dipaparkan oleh Jhon Lovell, bahwa suatu sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :⁷

- a) Serangkaian bagian yang secara bersama-sama mampu melakukan kegiatan untuk mencari suatu tujuan. Begitu pula sekumpulan unit-unit yang membentuk sistem politik bertujuan membuat keputusan untuk masyarakat.
- b) Hubungan fungsional antara bagian. Dalam suatu sistem, setiap bagian menjalankan fungsi yang mempengaruhi efektifitas kerja suatu sistem. Karena itu setiap bagian penting, tidak berfungsinya bagian memang tidak membuat sistem itu hancur, tetapi sistem itu akan macet.
- c) Hubungan sistem dengan lingkungan. Sebagai sistem Terbuka, sistem politik berhubungan terus-menerus dengan lingkungannya melalui penerimaan input, dalam bentuk tuntutan dan dukungan dari lingkungan. Dan melalui output, yang berupa upaya sistem untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan atau mengendalikannya.

Sedangkan menurut Elias M. Awad, menyebutkan bahwa ciri-ciri pokok suatu sistem adalah :⁸

- a) Sistem itu bersifat terbuka, atau pada umumnya bersifat terbuka.
- b) Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan setiap subsistem terdiri lagi dari subsistem yang lebih kecil lagi, dan begitu seterusnya.
- c) Diantara subsistem- subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan.
- d) Suatu sistem mempunyai kemauan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya (*Self-Adjustment*). Kegiatan ini dimungkinkan karena adanya sistem umpan balik atau balikan (*Feed Back*).
- e) Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*).

⁷ Jhon Lovell, sebagaimana dikutip Mochtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisas*, Press UGM, Yogyakarta, 1990, hal 115.

⁸ Elias M Awad, sebagaimana dikutip Tatang M. Amirin, "*Pokok-pokok Teori Sistem*", PT Raja

Suatu sistem dunia adalah suatu sistem sosial, yang menurut Immanuel Wallerstein, ditandai oleh kenyataan bahwa dinamikanya bersifat internal.⁹ Wallerstein beranggapan,¹⁰ bahwa dahulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintah lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia, masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan dan saling terpisah. Melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela, akhirnya sistem-sistem tersebut bergabung. Kemudian muncullah sebuah kerajaan yang dapat disebut dengan Kerajaan Dunia atau *World Empire*. Disebut demikian karena kerajaan tersebut mempunyai kekuatan wilayah yang besar jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini memerintah dengan sistem politik terpusat. Meskipun demikian, penguasaan kerajaan ini tidak dalam pengendalian yang ketat, cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk. Semakin jauh dari pusat kerajaan, maka daerah tersebut akan semakin bebas.

Masih menurut Wallerstein, bahwa dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik atau turun kelas. Sistem dunia yang dulu memberi keunggulan pada negara-negara yang bisa menghasilkan komoditi primer, pada saat lain keunggulan ini beralih kepada negara-negara yang mengembangkan industrinya. Sistem dunia ini juga yang kemudian memberikan kesempatan kepada negara-negara pinggiran yang sudah relatif siap untuk mengambil alih kesempatan untuk melakukan

⁹ Bjorn Hettne, "Teori Pembangunan dan Tiga Dunia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 211.

¹⁰

barang ini sudah tidak menguntungkan lagi di negara-negara pusat, karena upah buruh yang meningkat.

Di atas dapat kita lihat, bahwa Wallerstein telah membagi tiga kelompok negara, yaitu :

1. Negara pusat yang dapat mengambil keuntungan yang paling banyak dengan cara memanipulasi sistem dunia sampai batas-batas tertentu.
2. Negara setengah pinggiran yang dapat mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran.
3. Negara pinggiran merupakan obyek sistem dunia yang paling dieksploitir.

Dinamika dari ketiga kelompok negara tersebut telah ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein bahwa sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan negara kebangsaan dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup, dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan mereka berdiri sendiri.

Pendekatan Wallerstein,¹¹ didirikan oleh dua komitmen epistemologi fundamental. Dia secara fundamental menentang bahwa seorang dapat mempelajari proses-proses perkembangan ekonomi di dalam negara-negara tanpa menempatkan mereka dalam suatu konteks historis yang lebih luas. Mempelajari negara seolah-olah ia merupakan kesatuan dimana masalah-masalah itu digeneralisasikan dan dipecahkan, adalah menerima ideologi liberal yang dominan. Berdasarkan ideologi ini, jalan keluar ekonomi yang tidak berkembang dari negara miskin adalah mengadopsi karakteristik budaya, ekonomi, politik negara berkembang. Jika pemerintah mengadopsi kebijakan pasar bebas dan

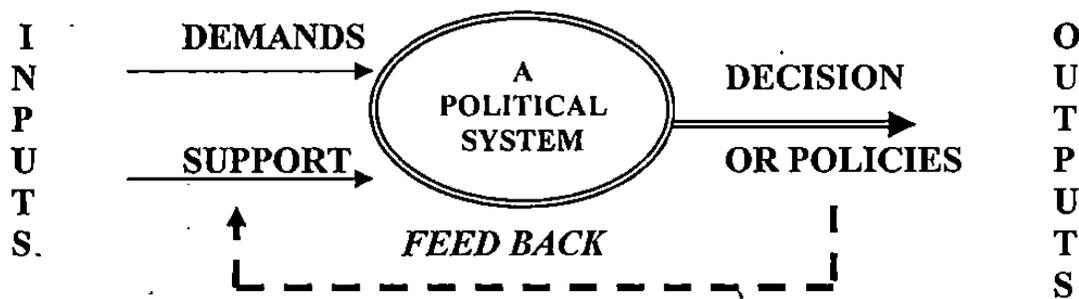
¹¹ Martin Griffiths, "Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 340-341.

memajukan perusahaan-perusahaan swasta, maka tidak ada halangan yang jelas bagi modernisasi.

Wallerstein mengambil isu-isu kiri yang percaya negara-negara belum berkembang dimajukan oleh negara-negara *Core* (pusat) yang kemakmurannya terletak pada kemampuan mereka untuk menggali surplus ekonomi dari negara *periphery* (pinggiran). Wallerstein juga berpendapat bahwa dalam sistem tunggal dunia, negara-negara *periphery* tidak dapat berkembang sepanjang jalur yang berbeda dari negara-negara yang dipaksa oleh *Core*.

Pendekatan Wallerstein di atas oleh para sarjana-sarjana lain sering disebut dengan pendekatan teoritis *structural adjustment*, sedangkan sarjana-sarjana yang lebih ortodoks menyebutkan pendekatan teoritis *structural functionalism*.¹² Hal ini berarti bahwa subsistem-subsistem yang ada dalam sistem dunia ini harus bisa menyesuaikan (*adjustment*) dengan struktur kapitalisme sebagai kekuatan global.

Tanpa membatasi pernyataan masalah sistem politik dunia yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem politik dunia mempunyai batas dalam arti yang sama dengan yang dimiliki oleh suatu sistem fisik. Batas suatu sistem politik dunia dapat dinyatakan dengan semua tindakan atau aktivitas yang sedikit banyak berhubungan secara langsung dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat tiap-tiap negara yang bergabung didalamnya; setiap tindakan atau aktivitas dunia yang tidak mengandung ciri-ciri tersebut akan dikeluarkan dari sistem politik dunia dan dengan demikian secara otomatis akan



Gambar 1.1 Sistem Politik
 Sumber : Drs Haryanto¹³

Sebagaimana kita ketahui perputaran minyak dunia merupakan salah satu fenomena global, dalam sistem produksi dan penentuan harga minyak dunia. Hal ini yang dapat diciptakan oleh negara-negara pusat dan negara-negara minyak yang terbentuk dalam OPEC. Untuk mengikuti sistem itu negara Indonesia sebagai negara setengah pinggiran yang termasuk dalam sistem politik dunia sekaligus sebagai negara OPEC sejak 1977 harus include didalamnya yang kemudian berdampak pada kebijakan nasional dan terjadilah krisis BBM tahun 2005 sebagaimana terjadi di pasar minyak dunia.

Sedangkan OPEC sendiri sebagai *organisatory-sistem*, juga dapat mengalami kritisnya perputaran minyak dunia dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara pusat, dimana telah memiliki cadangan minyak yang cukup untuk negaranya. Hal ini dapat terjadi disebabkan adanya kebijakan-kebijakan negara-negara minyak yang terbentuk dalam OPEC bekerjasama dengan negara-negara pusat atau industri tidak dibatasi kapasitasnya dalam pertahun secara berangsur-rangsur. Sehingga fungsi OPEC dalam mengontrol stabilitas perputaran minyak dunia dapat menjadi mandul sebagai *feed back* dari kebijakan yang selama ini tidak dicermati dengan arif.

¹³ Drs Haryanto, *Sistem Politik Suatu Bangsa dan Demokrasi Berkeadilan*, Yogyakarta, 1992, hal 10

2. Konsep Kepentingan Nasional

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai acuan kerangka dasar pemikiran. Konsep kepentingan nasional tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat eksplanasi dan prediksi untuk mengupas permasalahan.

Sebelum pada konsep utama yang akan dipakai dalam menjawab permasalahan, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tentang politik luar negeri. Melalui politik luar negeri ini, suatu negara bangsa mengadakan interaksi dengan lingkungan eksternalnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, Jack C. Plano dan Roy Olton telah mengembangkan sebuah definisi tentang Politik Luar Negeri sebagai berikut : “ *Foreign Policy is a strategy or planned course of actions developed by the decision maker of a state vis a vis other state or international entities aimed Amerika Serikat achieving specific goals defined intern of national interest.* ”¹⁴

Dari definisi diatas, terlihat adanya empat elemen utama yang selalu tedapat dalam Politik Luar Negeri yaitu Strategi ;Aktor pembuat keputusan ;Lingkungan eksternal ; dan Tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Unsur kepentingan nasional itulah yang akan dikembangkan lebih lanjut sebagai konsep utama yang akan dipakai dalam menjawab permasalahan. Jadi, politik luar negeri bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan cita – cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama dan mendasar dari suatu negara.

¹⁴ Jack C. Plano and Roy Olton, “*The International Relations Dictionary*”, Third Editions (California, Western Michigan University. ABC-clio, 1982) hal 460

Dengan kata lain, politik luar negeri tidak lain merupakan langkah nyata untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada tahap oprasional, kepentingan nasional yang tercermin dalam politik luar negeri itu diterapkan melalui beraneka ragam teknik perilaku yang berbeda bentuk – bentuk prilaku tersebut dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, konflik, perang atau apapun yang diterapkan dalam suatu negara untuk mempengaruhi dunia luarnya demi menjamin kepentingan nasionalnya. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasionalnya adalah :

“ ... the fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conceptions of those element that constitute the state's most vital needs. They include self preservation, independence, territorial, military security and economic well being”.¹⁵

Yaitu tujuan yang mendasar yang menjadi tuntutan para pembuat keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Kepentingan Nasional suatu negara merupakan konsepsi secara umum dari 4 (empat) elemen utama yang dibutuhkan oleh suatu negara. Elemen tersebut adalah pengakuan atas dirinya, kemerdekaan, kesatuan wilayah, keaman dan ekonomi yang terjaga.

Sedang menurut Morgenthau, dalam *Politics Among Nations*, Kepentingan Nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian atas negara dan negara lain.¹⁶ Pengendalian itu dapat melalui teknik – teknik paksaan maupun kerjasama.

¹⁵ Jack C. Plano and Roy Olton, “*The International Relations Dictionary*” (Rinehard and Winstone, 1969) hal 128

¹⁶ Maekter Mar'ud, *Umu: Hubungan International Relations Dictionary* (Rinehard and Winstone

Pengendalian yang dimaksud disini bukan hanya berarti kemampuan suatu negara untuk “mendikte” atau mengarahkan negara lain agar selalu bertindak sebagaimana yang dikehendaki negara pertama tersebut, tetapi pengendalian itu lebih luas cakupannya yaitu suatu kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan minimum dalam menjaga kelangsungan hidupnya (survival) di tengah – tengah pergaulan dengan negara lain.

Kemampuan minimum yang menjadi tuntutan vital dari kepentingan nasional sebuah negara meliputi tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, yaitu harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya. Kedua, harus mampu mempertahankan rezim ekonomi politiknya. Ketiga, perlindungan terhadap identitas kulturalnya, yaitu harus mampu memelihara norma – norma etnis, religius, linguistik dan sejarah. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Kepentingan Nasional suatu negara tidak akan lepas dari keharusan mengamankan wilayah, memajukan kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan kultur negara – negara bangsa.¹⁷

Melambungnya harga minyak yang sempat menyentuh rekor level tertinggi hingga 60,63 US \$ per barel pada awal desember 2005 menyebabkan para anggota OPEC harus mampu mengencangkan ikat pinggangnya dalam rangka penghematan bahan bakar minyak di negaranya masing – masing. Kondisi semacam ini tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena adanya sebuah keadaan yang dilematis peran OPEC yang pada saat itu tidak memiliki batasan yang jelas mengenai ekspor minyak dunia terhadap negara – negara

¹⁷ Hans J. Morganthau dalam T. A. Columbia and J. H. Wolfe, *Introduction to International*

penyandang “*Super Power*” seperti Amerika Serikat dan Cina. Dimana negara – negara tersebut merupakan kawasan industri terbesar yang tentu saja sebagai pengonsumsi sumber energi minyak berlebih. Ketidak berdayaan OPEC yang tidak mampu menolak permintaan pasokan minyaknya ke negara – negara tersebut dikarenakan faktor politik, dalam hal ini adanya kemungkinan ekspansi ekonomi. Analisis menyebutkan, tingginya harga minyak mentah dengan kondisi kurs dolar yang terus meningkat membuat negara – negara seperti Indonesia harus mampu mengambil tindakan preventive guna meredam lonjakan harga tersebut serta berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan, melalui kebijakan – kebijakan yang akan ditempuh.

Minyak sebagai salah satu sumber energi bumi yang terbesar kini menjadi sangat langka, seolah menjadi sebuah prestise tertinggi dan media *source of power* bagi negara yang memiliki kelebihan cadangan minyak Konsep Kepentingan Nasional oleh Morgenthau, dimana kepentingan dalam bidang kedaulatan, ekonomi, prestise, dan sebagainya akan mempengaruhi perilaku maupun kebijakan suatu negara. Seperti negara Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam OPEC yang menggantungkan kehidupan energi nasionalnya terbesar terhadap minyak serta sebagai salah satu pengimpor minyak jelas menurut teori ini Indonesia yang lebih ke arah faktor lemahnya perekonomian maka akan terkena imbas atau pengaruh dari krisis minyak internasional pada tahun 2005 dalam aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik

E. Hipotesa

Dengan memperhatikan pokok permasalahan di atas dan dengan kerangka teori yang ada, maka hipotesa sementara yang diambil adalah :

“Kelemahan sistem organisatoris OPEC dalam menetapkan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya dari dimensi ekonomi dan politik minyak dunia, serta didorong minimnya kontrol OPEC dalam pengawasan ekspor-impor minyak di tiap-tiap negara anggotanya, menyebabkan timbulnya krisis bahan bakar minyak dunia dan khususnya di Indonesia tahun 2005 “.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan teori yang bersifat umum sebagai landasan pemikiran yang kemudian akan dieksplorasi dengan suatu hipotesa dan akan dibuktikan dengan data empiris yang ada.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka dan wawancara dengan tokoh yang berkompetensi dalam hal ini. Oleh karena itu, data yang akan diperoleh adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang cukup relevan. Sedangkan data primer didapat dari hasil wawancara. Data yang akan diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang ditetapkan. Meskipun analisa sekunder dan beberapa wawancara selaku data primer, penulis yakin bahwa penelitian ini

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisa optimalisasi fungsi OPEC dalam perputaran minyak dunia yang mencakup tentang visi dan misi pembentukan OPEC itu sendiri hingga eksistensi kebijakan penetapan kartel OPEC, produksi, penetapan harga minyak di pasaran dunia. Penelitian ini akan dimulai dari tahun 1961 sejarah dibentuknya OPEC secara umum sampai pada aktualisasi perkembangan OPEC sampai tahun 2005. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan OPEC dalam rangka menjalankan stabilitas produksi dan penetapan harga minyak dunia yang pada akhirnya berdampak kepada stabilitas minyak dunia dan ekonomi, sosial-politik negara Indonesia tahun 2005.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan dan kerangka penulisan.

BAB II : Deskripsi Umum Tentang OPEC

Dalam Bab II ini penulis akan membahas mengenai konsep idealita (*das solen*) dasar dibentuknya OPEC, yang termasuk di dalamnya latar belakang sejarah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perspektif ekonomi dan politik OPEC, klasifikasi negara anggota

OPEC, pilihan politik OPEC, pola kerjasama OPEC, dan harga minyak dan kesepakatan pengadaan.

BAB III : Aktualisasi OPEC Dalam Perputaran Minyak Dunia

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai urgensi OPEC terhadap perputaran minyak dunia baik tentang laju pertumbuhan politik minyak internasional. Kemudian korelasi perputaran minyak dunia yang terdiri dari fluktuasi politik dan produksi minyak internasional. Kemudian akan dijelaskan kebijakan-kebijakan OPEC pra maupun pasca krisis BBM tahun 2005.

BAB IV : Analisa kebijakan OPEC Terhadap Timbulnya Krisis Minyak Di Indonesia Tahun 2005

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang analisa kebijakan OPEC, kemudian dilanjutkan produksi minyak Indonesia 2005. Juga akan dijelaskan mengenai kebijakan energi nasional, pengaruh atau dampak yang ditimbulkan krisis bahan minyak terhadap inflasi, kemiskinan, dan problematika sosial. Sementara pada akhir bab ini akan dipaparkan berhentinya era minyak murah dan bagaimana proyeksi minyak internasional di masa yang akan datang.

BAB V : Kesimpulan, dalam penelitian ini kesimpulan adalah analisis yang berasal dari hipotesa secara korelatif telah disesuaikan dengan fakta di lapangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah